




20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

- 18%  Internet sources
- 9%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 18% Internet sources
- 9% Publications
- 15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
journal.ikopin.ac.id		2%
2	Internet	
text-id.123dok.com		1%
3	Internet	
eprints.ums.ac.id		<1%
4	Internet	
ejurnal.seminar-id.com		<1%
5	Internet	
digilib.uinsgd.ac.id		<1%
6	Submitted works	
UM Surabaya on 2024-05-12		<1%
7	Internet	
gicipress.com		<1%
8	Submitted works	
Universitas Diponegoro on 2024-01-26		<1%
9	Internet	
media.neliti.com		<1%
10	Internet	
repository.stei.ac.id		<1%
11	Submitted works	
Universitas Putera Batam on 2021-03-05		<1%

12	Internet	fusion.rifainstitute.com	<1%
13	Internet	repo.darmajaya.ac.id	<1%
14	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
15	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
16	Publication	Ainil Fhadilah, Lina Ade Chusmita. "Pengaruh Pelayanan di Masa Pandemi Covid-..."	<1%
17	Internet	jurnal.uinbanten.ac.id	<1%
18	Internet	jurnal.unived.ac.id	<1%
19	Submitted works	Binus University International on 2020-06-18	<1%
20	Submitted works	Universitas Brawijaya on 2023-07-02	<1%
21	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2023-05-11	<1%
22	Internet	frangao.net	<1%
23	Internet	repository.unj.ac.id	<1%
24	Submitted works	Ajou University Graduate School on 2023-07-18	<1%
25	Publication	Melita - Rosiyanti, Yeni Oktaviani, Irma Novida. "PENGARUH NPF, FDR, DAN BOPO..."	<1%

26	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
27	Internet	es.scribd.com	<1%
28	Internet	journal.ipm2kpe.or.id	<1%
29	Internet	repo.uinsatu.ac.id	<1%
30	Internet	123dok.com	<1%
31	Submitted works	Universitas Diponegoro on 2024-10-29	<1%
32	Submitted works	Universitas Ibn Khaldun on 2020-06-04	<1%
33	Submitted works	Universitas Jenderal Soedirman on 2022-12-30	<1%
34	Submitted works	Universitas Putera Batam on 2020-12-04	<1%
35	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
36	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
37	Internet	www.fao.org	<1%
38	Internet	www.journal.stieamkop.ac.id	<1%
39	Submitted works	IAIN Bukit Tinggi on 2024-07-18	<1%

40	Submitted works	Universitas Pamulang on 2023-09-07	<1%
41	Submitted works	Universitas Putera Batam on 2020-12-01	<1%
42	Submitted works	Universitas Putera Batam on 2025-01-28	<1%
43	Submitted works	University of Muhammadiyah Malang on 2021-08-21	<1%
44	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
45	Internet	eprints.upnyk.ac.id	<1%
46	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
47	Internet	gubugpengetahuan.blogspot.com	<1%
48	Internet	lib.unnes.ac.id	<1%
49	Internet	repository.fe.unj.ac.id	<1%
50	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
51	Internet	scholarhub.ui.ac.id	<1%

Determinasi Faktor Ekonomi Terhadap Upah Minimum di Jawa Timur

Bintis Ti'anutud Diniati¹, Uswatun Khasanah²

^{1,2} Ekonomi Sariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

bintis.t.diniati@gmail.com, uswatunkhasanah8010@gmail.com

Abstrak

Meningkatkan standar hidup pekerja adalah salah satu tujuan utama dari undang-undang upah minimum. Oleh karena itu, demi tercapainya tingkat kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius kebijakan penetapan upah minimum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh simultan dan parsial variabel makroekonomi terhadap upah minimum provinsi di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif dan pemilihan model optimal untuk menguji data panel dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode asosiatif. Berdasarkan hasil temuan, REM (*Random Effects Model*) merupakan model yang paling sesuai. Pada saat yang sama, upah minimum sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks harga konsumen, indeks pembangunan manusia, dan pengeluaran per kapita. Sementara indeks harga konsumen memiliki pengaruh negatif terhadap upah minimum di Jawa Timur, indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif, dan tingkat partisipasi angkatan kerja serta pengeluaran per kapita tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Kata kunci: Indeks Harga Konsumen; Indeks Pembangunan Manusia; Pengeluaran Perkapita; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Upah Minimum Provinsi.

Abstract

Improving workers' standard of living is one of the main objectives of the minimum wage law. Therefore, in order to achieve a decent level of living for workers and their families, the government needs to seriously consider the policy of setting minimum wages. The purpose of this study is to examine the simultaneous and partial effects of macroeconomic variables on provincial minimum wages in East Java from 2019 to 2023. This study uses descriptive statistical tests and optimal model selection to test panel data using a quantitative approach and associative methods. Based on the findings, REM (*Random Effects Model*) is the most suitable model. At the same time, the minimum wage is strongly influenced by variables such as labor force participation rate, consumer price index, human development index, and per capita expenditure. While the consumer price index has a negative influence on the minimum wage in East Java, the human development index has a positive influence, and the labor force participation rate and expenditure per capita show no significant influence.

Keywords: Consumer Price Index; Human Development Index; Per Capita Expenditure; Labor Force Participation Rate; Provincial Minimum Wage.

PENDAHULUAN

Upah merupakan salah satu aspek fundamental yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pemberian upah yang adil, sesuai dengan hasil kerja dan kebutuhan hidup, menjadi perhatian utama bagi pengusaha (Charysa, 2013). Besaran upah ditentukan berdasarkan durasi kerja yang ditempuh atau jumlah output yang dihasilkan oleh pekerja. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja sangat bergantung pada upah yang mereka terima, mengingat pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, peningkatan upah menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan serta kesejahteraan secara keseluruhan.

Teori ekonomi klasik memberikan penjelasan terkait upah, dengan keyakinan bahwa terdapat cadangan upah yang cenderung menyesuaikan dengan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum tenaga kerja (Jhingan, 2016). David Ricardo juga berpendapat bahwa upah memiliki peran penting dalam menentukan pendapatan antara modal dan tenaga kerja. Ketika harga barang yang dibutuhkan tenaga kerja meningkat, tingkat upah pun akan ikut naik (Jhingan, 2016). Secara umum, tingkat upah diatur oleh pemerintah, yang bertujuan memberikan keadilan bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam menetapkan upah. Kebijakan pengupahan yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan tenaga kerja dan keluarganya memperoleh standar kehidupan yang layak, serta mendorong peningkatan produktivitas dan daya beli mereka (Ketiasih, 2017). Kebijakan ini dikenal dengan upah minimum, yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja dari rendahnya nilai upah dan mencegah eksploitasi.

Setiap daerah memiliki kebijakan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan yang layak di daerah tersebut. Upah minimum terbagi menjadi dua kategori, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Di Indonesia, penentuan UMP harus lebih tinggi dari rata-rata UMP nasional, dan menjadi acuan bagi daerah yang menggunakan UMK dalam sistem pengupahan. Besaran UMP tidak boleh lebih tinggi daripada UMK, sehingga setiap daerah memiliki perbedaan dalam besaran UMP dan UMK yang sesuai dengan kondisi ekonomi daerah masing-masing.

Sejak tahun 2019 hingga 2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan positif pada tingkat upah setiap tahunnya. Peningkatan upah minimum tersebut disebabkan oleh penyesuaian pemerintah terhadap kondisi perekonomian daerah. Selain itu, penetapan kenaikan upah minimum ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan jaminan agar tenaga kerja mendapatkan upah yang pantas.

47 Tenaga kerja menginginkan upah yang diterima tidak hanya layak, tetapi juga cukup, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, stabilitas dan peningkatan upah setiap tahunnya diharapkan dapat terjaga. Perkembangan UMP Jawa Timur yang terus meningkat kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Per Kapita.

Salah satu faktor yang memengaruhi upah minimum provinsi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mencerminkan penawaran tenaga kerja di pasar, yang memungkinkan pemerintah untuk menentukan besaran upah yang layak. Ketika lapangan pekerjaan terbatas, TPAK cenderung menurun, yang menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja ini biasanya diserap oleh sektor informal yang tidak terikat oleh regulasi upah, yang akhirnya dapat menurunkan tingkat upah (Sutama et al., 2019).

36 Menurut teori pandangan klasik, TPAK mencerminkan hubungan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terhadap upah. Teori ini menjelaskan bahwa upah akan menyesuaikan diri untuk mengatasi kelebihan penawaran tenaga kerja di pasar. Ketika permintaan tenaga kerja menurun, akan tercipta kelebihan tenaga kerja, yang menyebabkan penurunan upah. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan di pasar (Mankiw et al., 2012).

22 Selain TPAK, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur juga diperkirakan dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan serta kesejahteraan suatu negara, dan dapat menggambarkan tingkat kualitas tenaga kerja dalam hal keterampilan dan kemampuan bekerja. IPM berhubungan langsung dengan upah, karena upah yang layak dapat mendorong peningkatan produktivitas dan jumlah produksi tenaga kerja (Aprilia & Aida, 2024).

49 Pengaruh IPM terhadap UMP sesuai dengan teori upah efisiensi, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara upah dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan upah akan memicu peningkatan produktivitas kerja. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik akan menghasilkan produktivitas tinggi, yang pada gilirannya akan mendorong tingkat upah yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas kontribusi produktif tersebut (Mankiw, 2007).

51 IPM yang tinggi akan mendorong kenaikan upah, termasuk UMP. Semakin baik kualitas tenaga kerja di suatu daerah, semakin menarik bagi pengusaha untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja dengan upah tinggi meningkat, sehingga tenaga kerja akan menerima upah lebih tinggi seiring dengan peningkatan hasil (output) yang dihasilkan (Mulyadi, 2008).

21 Selain TPAK dan IPM, Indeks Harga Konsumen (IHK) juga diduga mempengaruhi besaran UMP yang ditetapkan pemerintah. IHK mengukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa dalam periode tertentu. Ketika harga barang dan jasa meningkat, tenaga kerja cenderung menuntut kenaikan upah untuk mencocokkan peningkatan biaya hidup yang timbul akibat kenaikan harga tersebut. Dari perspektif tenaga kerja, upah ditentukan oleh perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang mereka konsumsi (Sukirno, 2007).

Teori yang diajukan oleh David Ricardo menjelaskan hubungan antara IHK dan upah. Teori ini menyatakan bahwa upah tenaga kerja dipengaruhi oleh biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika harga barang yang dikonsumsi tenaga kerja meningkat, upah juga cenderung mengalami kenaikan. Namun, dalam jangka panjang, lonjakan harga barang dan jasa dapat menurunkan daya beli tenaga kerja. Oleh karena itu, penyesuaian tingkat upah terhadap kenaikan harga barang menjadi hal yang esensial guna menjaga stabilitas daya beli pekerja. Indeks Harga Konsumen (IHK) berperan sebagai indikator yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah (Jhingan, 2016).

48 Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Timur kemungkinan dipengaruhi oleh pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita merujuk pada pengeluaran untuk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga dalam periode tertentu (Halim, 2012). Pengeluaran perkapita menjadi salah satu indikator penting untuk menggambarkan kesejahteraan tenaga kerja. Kesejahteraan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh besarnya upah yang diterima; semakin tinggi upah yang diperoleh, semakin besar kemungkinan kesejahteraan tenaga kerja akan meningkat.

35 Pengeluaran perkapita menggambarkan daya beli tenaga kerja melalui konsep Purchasing Power Parity (PPP) dan berfungsi sebagai indikator dalam menilai tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah (Mahrany, 2012). Indikator ini mencerminkan sejauh mana pencapaian dalam mewujudkan kehidupan yang layak, yang berkaitan dengan tingkat konsumsi riil per kapita. Kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar, sebagaimana tercermin dalam rata-rata konsumsi per kapita, digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan serta pencapaian pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Kesejahteraan tenaga kerja dianggap meningkat apabila konsumsi riil per kapita mengalami pertumbuhan (Mahrany, 2012).

Menurut teori ekonomi klasik, upah akan cenderung menyesuaikan dengan jumlah uang yang dibutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya (Jhingan, 2016). Agar daya beli tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, mereka membutuhkan pendapatan atau upah yang setara atau lebih tinggi dari tingkat daya beli tersebut. Dengan demikian, tenaga kerja akan dapat mencapai kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pengeluaran perkapita bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi yang layak bagi tenaga kerja di setiap daerah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana variabel-variabel berikut-TPAK, IPM, IHK, dan Pengeluaran Per Kapita-mempengaruhi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Untuk menguji hubungan antara beberapa faktor, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif (Sugiyono, 2018). Setiap dan semua entitas yang memiliki kesamaan ciri dengan target penelitian, yaitu Provinsi Jawa Timur, dianggap sebagai bagian dari populasi penelitian. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dikenal sebagai pengambilan sampel non-probabilitas, dan ini melibatkan pemilihan subset dari populasi secara acak (Sugiyono, 2018). Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sumenep merupakan enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian ini. Periode penelitian mencakup tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier untuk pengolahan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Estimasi Model Data Panel

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengevaluasi apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM) lebih sesuai dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun hasil dari uji Chow dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	246.550983	(5,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	124.121042	5	0.0000

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Uji Chow menunjukkan pada Tabel 1 bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-square adalah 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Temuan ini mendukung gagasan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai untuk investigasi ini. Jika Anda ingin mengetahui apakah Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM) yang lebih baik untuk analisis Anda, setelah Anda memilih FEM, jalankan uji Hausman.

Uji Hausman

Di antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM), uji Hausman digunakan untuk mengetahui model regresi data panel mana yang lebih sesuai. Berikut adalah hasil dari uji Hausman yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.167681	4	0.0068

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Pada Tabel 2, kita dapat melihat bahwa uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0008, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0008 < 0,05$). Temuan ini mendukung gagasan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang paling sesuai untuk investigasi ini. Uji *Lagrange Multiplier* tidak diperlukan karena prosedur pemilihan model sudah lengkap dengan pemilihan FEM. Oleh karena itu, analisis penelitian ini bergantung pada *Fixed Effect Model* (FEM).

Pengujian Statistik *Fixed Effect Model*

Tabel 3. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.572202	4.026244	0.887229	0.3834
X1_TPAK	0.020539	0.010447	1.966087	0.0605
X2_IPM	0.007862	0.002193	3.584884	0.0014
X3_IHK	-0.002901	0.000412	-7.036330	0.0000
LOG(X4_PKAP)	0.576213	0.291637	1.975786	0.5593

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.875809	Mean dependent var	14.75691
Adjusted R-squared	0.855938	S.D. dependent var	0.269108
S.E. of regression	0.023317	Akaike info criterion	-4.579008
Sum squared resid	0.013592	Schwarz criterion	-4.273342
		Hannan-Quinn	
Log likelihood	81.38692	critier.	-4.609890
F-statistic	44.07567	Durbin-Watson stat	2.221093
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan tabel 3 hasil estimasi *Fixed Effect Model* dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = 3,572202 - 0,020539X_1 + 0,007862X_2 - 0,002901X_3 + 0,576213X_4 + \mu_{it} \quad (1)$$

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 3,572202 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen mengalami peningkatan satu satuan secara rata-rata, maka variabel dependen, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), akan meningkat sebesar 3,572202.
- Koefisien regresi variabel X1 (TPAK) bernilai negatif sebesar -0,020539, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akan menyebabkan UMP menurun sebesar 0,020539, demikian pula sebaliknya.
- Koefisien regresi variabel X2 (IPM) bernilai positif sebesar 0,007862, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkatkan UMP sebesar 0,007862, begitu pula sebaliknya.
- Koefisien regresi variabel X3 (IHK) bernilai negatif sebesar -0,002901, yang mengindikasikan bahwa kenaikan satu satuan dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) akan menurunkan UMP sebesar 0,002901, dan sebaliknya.

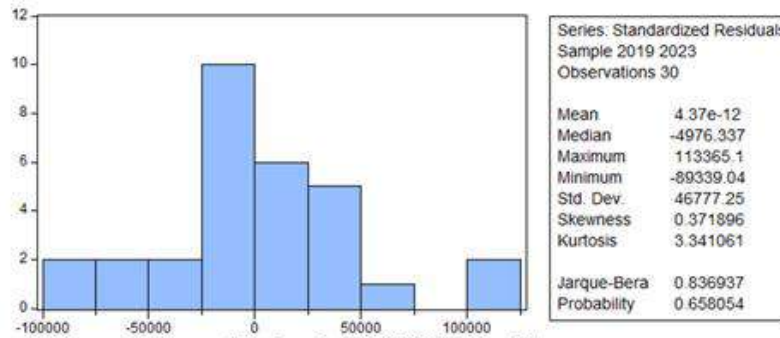
- e. Koefisien regresi variabel X4 (Pengeluaran Perkapita) bernilai positif sebesar 0,576213, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Pengeluaran Perkapita akan meningkatkan UMP sebesar 0,576213, demikian pula sebaliknya.

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan model regresi yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini sesuai dengan asumsi klasik yang diperlukan, maka dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sangat penting dilakukan sebelum menggunakan analisis regresi. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

a. Uji Normalitas Data

Untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi berdistribusi normal adalah tujuan dari pengujian normalitas. Memiliki distribusi normal adalah kualitas penting dari model regresi yang layak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B). Berikut ini disajikan hasil dari pengujian normalitas tersebut.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan gambar 1 dari uji normalitas, nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,658054, yang lebih besar dari 0,05 ($0,658054 > 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa H_0 diterima, yang berarti data mengikuti distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam model regresi berkorelasi linear atau berhubungan, dilakukan pengujian multikolinieritas. Mungkin sulit untuk menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen ketika ada multikolinieritas. Oleh karena itu, data yang baik seharusnya tidak mengalami masalah multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1_TPAK	X2_IPM	X3_IHK	LOG(X4_PKAP)
X1_TPAK	1.000000	-0.558170	-0.005227	-0.198507
X2_IPM	-0.558170	1.000000	-0.020409	0.615010
X3_IHK	-0.005227	-0.020409	1.000000	0.067076
LOG(X4_PKAP)	-0.198507	0.615010	0.067076	1.000000

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua nilai korelasi kurang dari 0,90, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. Ini berarti bahwa H_0 , hipotesis nol, tidak mungkin benar. Penemuan ini menghilangkan kekhawatiran tentang multikolinieritas dalam kumpulan data.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksamaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas. Jika model menunjukkan adanya heteroskedastisitas, maka kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi tidak valid. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Heteroskedasticity Test: White</i>			
<i>F-statistic</i>	1.963162	<i>Prob. F(4,24)</i>	0.1325
<i>Obs*R-squared</i>	7.149384	<i>Prob. Chi-Square(4)</i>	0.1282
<i>Scaled explained SS</i>	8.603788	<i>Prob. Chi-Square(4)</i>	0.0718

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square pada Obs R-squared lebih besar dari 0,05 ($0,1282 > 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi yang signifikan antara observasi dalam berbagai periode waktu. Keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi bias serta varians yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Oleh karena itu, model regresi yang baik seharusnya bebas dari masalah autokorelasi. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian autokorelasi:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</i>			
<i>F-statistic</i>	0.675825	<i>Prob. F(2,22)</i>	0.5190
<i>Obs*R-squared</i>	1.678591	<i>Prob. Chi-Square(2)</i>	0.4320

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan Tabel 6, nilai probabilitas Chi-Square pada Obs R-squared sebesar 0,4320, yang melebihi ambang batas 0,05 ($0,4320 > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil dari uji F:

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

<i>F-statistic</i>	<i>Prob. (F-statistic)</i>	Keterangan
44.07567	0.0000	Berpengaruh signifikan

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan tabel 7, nilai F-Statistic tercatat sebesar 44.07567 dengan nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel TPAK, IPM, IHK, dan Pengeluaran Perkapita secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu UMP. Oleh karena itu, H_1 dapat diterima.

b. Uji T (Parsial)

Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur merupakan variabel dependen di sini, dan uji T digunakan untuk melihat pengaruh TPAK, IPM, IHK, dan Pengeluaran Per Kapita secara parsial terhadap variabel ini. Hasil uji T secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	t-statistic	Prob.	Keterangan
C	0.887229	0.3834	-
TPAK	1.966087	0.0605	Tidak berpengaruh signifikan
IPM	3.584884	0.0014	Berpengaruh positif dan signifikan
IHK	-7.036330	0.0000	Berpengaruh negatif dan signifikan
Pengeluaran Perkapita	1.975786	0.5593	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Berdasarkan tabel 8, hasil uji T dapat dilihat pengaruh setiap variabel independen yang mempengaruhi upah minimum kabupaten/kota, yaitu:

1) Variabel TPAK

Probabilitas variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,0605, yang melampaui tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa TPAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur, sehingga hipotesis H2 tidak dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armidi et al. (2018), yang menemukan bahwa secara parsial, TPAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jambi selama periode 2000-2015. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perubahan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja tidak memengaruhi besaran UMP di Jambi. Hal tersebut disebabkan karena rata-rata perkembangan TPAK pada tahun 2000 hingga 2015 hanya sebesar 0,09 persen saja. Sedangkan, rata-rata perkembangan UMP Jambi sebesar 16,77 persen. Ketimpangan rata-rata dari TPAK dan UMP menunjukkan bahwa perkembangan UMP meningkat, tapi tidak sejalan dengan perkembangan TPAK yang relatif stagnan karena nilainya di bawah satu persen.

Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018), yang mengatakan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini disebabkan karena data TPAK di Provinsi DIY dari tahun 1990 hingga 2016 cenderung berfluktuasi. Penduduk dianggap sebagai penduduk usia kerja pada periode 1990 hingga 2009 jika mereka berusia 10 tahun atau lebih. Selain itu, individu yang dianggap sebagai usia kerja didefinisikan sebagai mereka yang berusia lima belas tahun atau lebih pada tahun 2010. Oleh karena itu, terjadi perbedaan data yang tersedia, sehingga data TPAK cenderung fluktuatif dan tidak selalu naik di setiap tahun. Sedangkan, data UMP setiap tahun selalu naik. Oleh karena itu, terjadi ketidaksesuaian perkembangan TPAK dan UMP (Wibowo, 2018).

Hasil penelitian ini diperkuat oleh studi yang dilakukan oleh Putri & Aisyah (2024), yang menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh terhadap upah minimum. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian upah yang didasarkan pada mekanisme penawaran dalam pasar tenaga kerja. Penurunan penawaran pasar tenaga kerja menyebabkan ketersediaan tenaga kerja yang tinggi dan upah tenaga kerja yang menjadi rendah (Putri & Aisyah, 2024).

2) Variabel IPM

8 Probabilitas variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 0,0014, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur, sehingga hipotesis H3 dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2014), yang menunjukkan bahwa IPM berkontribusi positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi terhadap peningkatan upah minimum di tingkat provinsi. Oleh karena itu, IPM memiliki hubungan positif dengan upah minimum, di mana peningkatan IPM akan diikuti dengan peningkatan produktivitas, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan tingkat upah (Susanto, 2014).

3 Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Damanik & Zalukhu (2021), yang mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Faktor yang mendasari hubungan tersebut adalah kondisi IPM di Kota Pematangsiantar yang tergolong baik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan upah minimum di tingkat provinsi. Sehingga, ketika IPM mengalami kenaikan akan mempengaruhi meningkatnya Upah Minimum Kota Pematangsiantar (Damanik & Zalukhu, 2021).

3) Variabel IHK

41 Probabilitas variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 0,0000, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa IHK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur, sehingga hipotesis H4 dapat diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Armidi et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa secara parsial, IHK berdampak negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jambi pada periode 2000–2015. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan IHK cenderung menurunkan upah minimum provinsi, karena kenaikan harga barang mengurangi daya beli upah riil. Selain itu, hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Sitorus (2020) yang menemukan bahwa IHK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum provinsi di Indonesia pada periode 2009–2018. Dengan demikian, peningkatan IHK berpotensi menyebabkan penurunan upah minimum provinsi. (Sitorus, 2020).

4) Variabel Pengeluaran Perkapita

38 16 Probabilitas variabel Pengeluaran Perkapita tercatat sebesar 0,5593, yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PKAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga hipotesis H5 tidak dapat diterima. Temuan penelitian ini berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh Kusumaningrum & Nurhayati (2023) yang menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), di mana peningkatan pengeluaran per kapita umumnya diikuti oleh kenaikan upah minimum. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertentangan dengan studi yang dilakukan oleh Yunita & Sirait (2020) yang menemukan bahwa pengeluaran per kapita memiliki pengaruh signifikan terhadap UMK di wilayah Pulau Kalimantan. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik pengeluaran per kapita di Pulau Kalimantan yang sejalan dengan klasifikasi UMK, di mana wilayah barat Pulau Kalimantan cenderung memiliki pengeluaran per kapita dan UMK yang rendah, sedangkan wilayah timur menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita dan UMK yang lebih tinggi (Yunita & Sirait, 2020).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Nilai R^2 berada dalam rentang 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), di mana semakin mendekati 1, semakin besar proporsi variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor kesalahan. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, maka kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin kecil (Wahyudi, 2017). Berikut ini ditampilkan hasil Uji Determinasi dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-squared</i>	0.875809
<i>Adjusted R-squared</i>	0.855938

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah

Mengacu pada Tabel 9, nilai Adjusted R Square yang diperoleh adalah 0,855938. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Perkapita, secara bersama-sama menjelaskan 85% variasi dalam variabel dependen, yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, sekitar 15% variabilitas UMK dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pengeluaran Perkapita berpengaruh terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur. Namun, berdasarkan uji hipotesis secara parsial, TPAK dan IHK tidak memiliki dampak langsung terhadap UMK. Di sisi lain, IPM terbukti memiliki pengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP), yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat cenderung diikuti oleh kenaikan upah minimum. Di sisi lain, pengeluaran perkapita tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap upah minimum, meskipun fluktuasi pengeluaran ini berdampak pada daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan inflasi dan kondisi ekonomi daerah, lebih dominan dalam menentukan besarnya upah minimum dibandingkan faktor-faktor lain seperti TPAK dan IHK.

Sebagai saran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur disarankan untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi lokal dalam menetapkan upah minimum, baik UMP maupun UMK. Indikator seperti IPM dan pengeluaran perkapita perlu dipertimbangkan dengan baik karena keduanya memiliki hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas rentang waktu dan sampel daerah, serta menggunakan metode analisis yang lebih komprehensif, seperti VAR atau VECM, untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan panjang serta kontribusi masing-masing variabel terhadap penetapan upah minimum.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, A., & Aida, N. (2024). Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi Lampung. *Jurnal Ekobistek*, 13(1), 7–12. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i1.766>

- Armidi, A., Erfit, E., & Yulmardi, Y. (2018). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 7(1), 33–42. <https://doi.org/10.22437/jels.v7i1.4654>
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 277–285. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.2489>
- Damanik, D. C., & Zalukhu, R. S. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Di Kota Pematangsiantar. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 38–51. <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v3i1.119>
- Halim, M. A. (2012). Teori Ekonomika Edisi 1. *Tangerang: Jelajah Nusa*.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (1st ed.). RajaGrafindo Pesada.
- Ketiasih, L. (2017). Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Regional (Umr) Di Provinsi Bali Pada Tahun 2008-2015. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(1), 148–157.
- Kusumaningrum, R. R., & Nurhayati, S. F. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Pekalongan Tahun 2017-2021. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 510–517. <https://doi.org/10.37531/mirai.v8i1.4433>
- Mahrany, Y. (2012). Pengaruh indikator komposit indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. *Skripsi: Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hassanudin, Makassar*.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi* (6th ed.). Erlangga.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro* (1st ed.). Salemba Empat.
- Mulyadi, S. (2008). *Ekonomi sumber daya manusia : dalam perspektif pembangunan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Putri, L. L. I., & Aisyah, S. (2024). Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 385. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1434>
- Sitorus, E. T. B. (2020). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Indonesia*. Universitas Islam Riau.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta CV.
- Sukirno, S. (2007). *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. RajaGrafindo Pesada.
- Susanto, B. S. (2014). Penyerapan tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap upah minimum di Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Management Studies*, 1(1),

21–32. <https://doi.org/10.55171/v1i1.102>

Sutama, I. N., Asmini, A., & Astika, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(3), 281–291. <https://doi.org/10.58406/jeb.v7i3.545>

Wahyudi, S. T. (2017). *Statistika Ekonomi Konsep, Teori, dan Penerapannya*. UB Press.

Wibowo, A. A. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yunita, I., & Sirait, T. (2020). Penerapan SAR Pada Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Pulau Kalimantan Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics, 2019(1)*, 396–406. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.134>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Bintis Ti'anutud Diniati <bintis.t.diniati@gmail.com>

Co-Value Submission Acknowledgement

1 pesan

jurnal ikopin <jurnalikopin@gmail.com>

13 Januari 2025 pukul 11.08

Kepada: Bintis Ti'anutud Diniati <bintis.t.diniati@gmail.com>

Dear Bintis Ti'anutud Diniati

Thank you for submitting the manuscript, "Determinasi Faktor Ekonomi Terhadap Upah Minimum di Jawa Timur" to Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/authorDashboard/submission/5108>

Username: bintis

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Eka Setiajatnika



Bintis Ti'anutud Diniati <bintis.t.diniati@gmail.com>

Revision Required : Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan

1 pesan

jurnal ikopin <jurnalikopin@gmail.com>

15 Januari 2025 pukul 09.23

Kepada: Bintis Ti'anutud Diniati <bintis.t.diniati@gmail.com>

Dear Bintis Ti'anutud Diniati

We have reached a decision regarding your submission to Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, "Determinasi Faktor Ekonomi Terhadap Upah Minimum di Jawa Timur".

Our decision is: Revision Required

Please make further improvements according to the reviewer's notes. To submit your revised manuscript, please log in as an author in OJS, and navigate to the "Revisions" folder.

Covalue Journal appreciates your contribution, and I look forward to receiving your revised manuscript.

Best Regards,
Eka Setiajatnika

2 lampiran**Review - Bintis Ti'anutud Diniati_ Uswatun Khasanah.docx**

115K

**Turnitin - Bintis Ti'anutud Diniati_ Uswatun Khasanah.pdf**

474K



Bintis Ti'anatud Diniati <bintis.t.diniati@gmail.com>

Accept Submission

1 pesan

jurnal ikopin <jurnalikopin@gmail.com>

24 Januari 2025 pukul 11.30

Kepada: Bintis Ti'anatud Diniati <bintis.t.diniati@gmail.com>

Thank you for submitting your revised manuscript to Jurnal Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan. We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, "Determinasi Faktor Ekonomi Terhadap Upah Minimum di Jawa Timur".

Our decision is to: Accept Submission

Eka Setiajatnika